

**GERAKAN DAKWAH
HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

Muhammaddin*
mohdink@gmail.com

Abstract : Hizb ut-Tahrir try to enforce Islamic Shariah throughda'wastrategy by multiple stages namely; Tatsqif Phase (coaching the cadre), Tafa'ul (interaction) and Istilamul Hukmi (takeover of power). First Phase: Forming a political party that will conduct training the cadre (Marhalah at-Tatsqif). Political party formed will prepare cadres who are acquainted with Islam and want to fight for Islam, these cadres are formed by routine education weekly and monthly, which will convey the ideas and methods of da'wa of the Hizb in order to establish the framework of the party. The second stage is interaction with the people and encouraged the people to carry the Islamic da'wah. It forms awareness and public opinion on the basis of the ideas and Islamic laws that has been selected and set the Hizb, to serve as thinking people who will encourage him to realize the life reality. The third stage: Stages of Acquisition of Power (Marhalah Istilam Al-Hukm), which is implemented to develop the message of Islam to the world.

Keywords: *Propagation and Hizb*

Abstrak : Hizbut Tahrir dalam upaya menegakkan syari'at Islam melakukan strategi dakwah dengan tahapan yaitu Tahap Tatsqif (pembinaan dan pengkaderan), tahap Tafa'ul (berintraksi) dengan umat dan tahap Istilamul Hukmi (pengambil alihan kekuasaan). Tahapan Pertama: Membentuk partai politik yang akan melakukan pembinaan atau pengkaderan (*Marhalah at-Tatsqif*). Partai politik yang dibentuk akan menyiapkan kader yang faham dengan Islam serta mau berjuang demi Islam, kader-kader ini dibentuk dengan pendidikan pengajian rutin mingguan dan bulanan, yang akan menyampaikan pemikiran dan metode dakwah Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. Tahapan kedua, adalah tahap berinteraksi dengan umat dan mendorongnya untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas dasar ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk berusaha mewujudkan dalam realita kehidupan. Tahap ketiga: Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (*Marhalah Istilam Al-Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia.

Kata Kunci : *Dakwah dan Hizbut Tahrir*

*Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Dari beberapa teori yang ada dapat menggambarkan bahwa: (1) Gerakan Islam dapat dilihat sebagai sesuatu yang berakar pada dinamika yang terjadi dalam sejarah panjang gerakan sosial dan pemikiran umat Islam itu sendiri; (2) Gerakan Islam tidaklah tunggal, melainkan beragam, baik dari strategi gerakan ataupun pemikiran dan ideologi yang dikembangkan. Perbedaan-perbedaan itu dibentuk oleh perbedaan kondisi sosial dan politik yang mereka hadapi sehingga ada gerakan yang bersifat *pragmatis politis* dan ada juga yang *revolusioner*, disamping itu ada pula yang bersifat *asketis isolatif*; (3) Gerakan Islam merupakan gerakan yang mencoba menawarkan resep untuk mengobati krisis sosial, politik dan budaya yang dihadapi oleh kaum muslim di zaman modern ini, meskipun barangkali ada bahkan mungkin banyak di antara kita yang tidak setuju dengan solusi solusi yang mereka tawarkan (Mujiburrahman, 2002: 91).

Upaya Hizbut Tahrir untuk menggerakkan dakwah Islam tersebut dengan berbagai gerakan, yang secara umum meminjam terminologi Esposito, dapat diidentifikasi beberapa landasan ideologis yang dijumpai dalam suatu gerakan yakni:

Pertama, Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap. Agama integral dengan politik, hukum dan masyarakat.

Kedua, Kegagalan masyarakat muslim disebabkan oleh penyimpangan mereka dari jalan lurus Islam dengan mengikuti jalan sekuler barat, dengan ideologi dan nilai-nilai sekuler materialis.

Ketiga, Pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada Islam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspirasinya dari al- Qur'an dan gerakan Islam besar yang pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.

Keempat, Untuk memulihkan kekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum terinspirasi Barat harus digantikan dengan hukum Islam, yang merupakan satu-satunya cetak biru yang bisa diterima bagi masyarakat muslim.

Kelima, Meski *westernisasi* masyarakat dikecam, modernisasi tidak. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterima, tetapi keduanya harus ditundukkan di bawah akidah dan nilai-nilai Islam demi menjaga dari *westernisasi* dan sekularisasi masyarakat muslim.

Keenam, Proses Islamisasi, atau lebih tepatnya, re-islamisasi, memerlukan organisasi-organisasi atau serikat serikat muslim yang berdedikasi dan terlatih, yang dengan contoh dan kegiatan mereka mengajak orang lain untuk lebih taat.

Sebagai suatu gerakan Islam memiliki beberapa karakteristik. Jahroni (2004) memaparkan karakteristik tersebut.

Pertama, Selalu mengekspresikan '*perang salib*'. Dalam konteks sekarang, hegemoni dunia Barat khususnya Amerika Serikat terhadap bangsa-bangsa lain sering dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan baru (*neo colonialisme*). Sementara itu ide-ide mengenai adanya konspirasi dunia Barat, termasuk di dalamnya gerakan Zionisme Yahudi, yang menentang Islam dan dunia Islam tetap berkembang dalam kelompok ini.

Kedua, penegakan hukum Islam adalah satu tuntutan yang tak ada tawar menawar, merupakan keharusan. Dengan kata lain, tidak ada jalan yang sah di dalam membentuk sebuah komunitas muslim yang benar-benar tunduk kepada Tuhan melainkan dengan jalan menjadikan Islam sebagai landasan bagi segalanya, termasuk kehidupan sosial dan politik.

Ketiga, terdapat sebuah kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut sistem sistemnya yang mapan tapi dianggap tidak 'sah', khususnya karena kurangnya perhatian terhadap masalah patologi sosial yang merajalela di Indonesia yang mereka identifikasi

sebagai maksiat dan kemungkaran. Karena itu sebagian dari kelompok ini tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga hukum pemerintah guna menanggulangi dan menghapus segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan dan tentu dengan cara-cara mereka sendiri tanpa mengindahkan ruang publik (*public sphere*) yang menjadi milik masyarakat luas.

Keempat, semangat untuk melakukan ‘ijtihad’ dengan dalih menegakkan agama sebagai lambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan di muka bumi mendapatkan tempat yang sangat dihormati dan diunggulkan. Melawan segala wujud kebatilan kemungkaran dan musuh-musuh yang membenci Islam diyakini merupakan sebuah tugas keagamaan yang suci. Jihad lebih dimaknai sebagai sebuah usaha fisik untuk memerangi musuh-musuh Islam.

Kelima, dengan merujuk kepada kasus Islam dan Yahudi di kawasan Palestina yang kian hari semakin buruk dan brutal, dan pertikaian antara Islam dan Kristen yang semakin tajam pada beberapa kawasan serta isu klasik kristenisasi, maka hubungan antar Islam dan Kristen secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi kelompok-kelompok “gerakan dalam Islam”.

Pembahasan mengenai gerakan banyak dibahas dalam Sosiologi Perubahan Sosial (*The Sociology of Social Change*). Hal ini merupakan keniscayaan sebab di penghujung abad XX umat manusia mengalami *transisi radikal* yakni karena kejayaan modernitas menuju ke bentuk kehidupan sosial baru yang disebut pasca modern. Adanya perubahan sosial yang sangat mencengangkan pada awal abad XXI ini salah satu faktor pendorongnya adalah gerakan sosial. Tak ada yang luput dari segala aspek kehidupan umat manusia, ilmu, seni, agama, moral, pendidikan, politik, ekonomi, kehidupan keluarga hingga juga aspek terdalam dalam kehidupan manusia semuanya mengalami perubahan (Lenski & Lenski, 1974: 3) (Sztompka, 2004: v).

Mengenai definisi gerakan sosial Sztompka memaparkan bahwa gerakan sosial harus terdiri dari komponen berikut (2004: 325).

1. Kolektifitas orang yang bertindak bersama
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama
3. Kolektifitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal
4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional

Menurut Sztompka (2004: 338): Gerakan sosial memiliki dinamika internal dan dinamika eksternal. Pada gugus pembahasan tentang dinamika internal maka gerakan dibagi atas empat tahap utama yaitu asal usul, mobilisasi, perluasan struktur dan terminasi.

Pertama, Semua gerakan sosial berasal dari kondisi historis khusus. Sebelumnya ada struktur, sudah tersedia tumpukan sumber daya dan fasilitas untuk gerakan. Gagasan yang sudah ada sebelum adanya struktur biasanya digunakan sebagai aset gerakan untuk membentuk keyakinan, ideologi, penentuan tujuan, pengenalan kawan dan lawan dan visi masa depannya. Kesemuanya ini tidak pernah merupakan ciptaan murni. Wawasan ideologi, bidang kultural atau ekspos historis masyarakat tertentu selalu sudah terbentuk lebih dahulu..

Struktur interaktif (organisasi) sebelum adanya gerakan mempunyai fungsi lain. Struktur ini menciptakan hambatan maupun kemudahan bagi gerakan. Jaringan komunikasi yang sudah terbentuk di kalangan anggota masyarakat atau sebagian penduduk, sebelum gerakan dimulai memainkan peran penting dalam proses merekrut dengan memobilisasi

Struktur ketimpangan sosial, hierarki kesejahteraan yang mapan kekuasaan dan gengsi, yang menimbulkan kontradiksi dan konflik antara berbagai segmen penduduk selalu dijadikan faktor pendorong utama untuk melakukan mobilisasi gerakan. Perbedaan hierarki kepentingan tersembunyi menimbulkan ketegangan dan kepedihan, keluhan dan kerugian di kalangan rakyat akan memotivasi orang untuk bergabung dengan gerakan protes atau pembaruan.

Kedua, Pada tahap mobilisasi gelombang pertama yang dikerahkan adalah orang yang mempunyai kesadaran dan kepekaan paling tajam terhadap isu sentral gerakan dan orang yang paling bertanggung jawab secara intelektual, emosional, moral, dan politis terhadap timbulnya gerakan. Orang seperti itu berkeyakinan dan memperlakukan gerakan sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Segera setelah gerakan berjalan, berkembang dan meraih sukses gelombang kedua pengesahan anggota menyusul. Gelombang kedua ini membawa anggota yang mencari keselarasan dan makna dalam kehidupan.

Beberapa studi gerakan sosial selalu membuktikan besarnya peran pemimpin karismatis: Jesus, Budha, Muhammad, Martin Luther King, Lech Walensa dan banyak yang lebih kecil lainnya mereka berhasil menguasai, mengilhami dengan antusiasme dan merangsang pengikutnya untuk bertindak dengan gagah berani

Ketiga, Pada tahap pengembangan struktural prosesnya berjalan mulai dari pengumpulan individu yang akan dimobilisasi hingga menjadikan mereka sebagai anggota penuh. Terdapat empat subproses morphogenesis internal di sini: kemunculan secara bertahap ide, kepercayaan, keyakinan dan istilah bersama tentang harapan dan protes. Melalui perjalanan waktu gerakan mengembangkan pandangan hidup (*weltanschauung*) khusus milik mereka sendiri, kemudian kemunculan institusionalisasi norma dan nilai baru yang mengatur fungsi internal gerak dan menyediakan kriteria untuk mengkritik kondisi eksternal yang akan dijadikan target gerakan itu sendiri. Proses berikutnya adalah kemunculan (terpolanya) struktur organisasi internal yang baru. Dampak utama pembangunan struktur internal di bidang ini adalah kemunculan organisasi gerakan sosial yang utuh dan resmi yang didefinisikan sebagai organisasi formal atau kompleks yang menyamakan tujuannya dengan preferensi tujuan gerakan sosial atau dengan preferensi gerakan tandingan dan berupaya melaksanakan tujuan itu, dan proses terakhir adalah kemunculan kristalisasi struktur peluang baru, hierarki ketergantungan, dominasi kepemimpinan, pengaruh dan kekuasaan baru di dalam gerakan.

Keempat, Pada tahap terakhir atau terminasi akan terdapat dua kemungkinan dalam karir gerakan. Pertama optimis. Gerakan menang dan oleh karena itu kehilangan *raison d'etre*-nya. Demobilisasi dan bubar. Kedua, pesimis. Gerakan tidak menang tetapi malah ditindas dan dikalahkan atau kehabisan potensi antusiasmenya dan secara bertahap mengalami pelapukan tanpa mencapai kemenangan.

Sementara itu dalam dinamika eksternal yaitu mengukur dampak gerakan terhadap masyarakat luas dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural. Beberapa unsur yang dapat dijadikan indikator dinamika eksternal adalah: *Potensi Pengubah*, yang berarti bahwa ukuran dampaknya terhadap struktur norma diperlihatkan dengan diperkenalkannya nilai, cara hidup, aturan perilaku, dan model peran baru di kalangan rakyat. *Potensi Reorganisasi* yang dipahami sebagai ukuran dampak gerakan terhadap pola dan saluran interaksi sosial, pembentukan ikatan sosial baru, pembentukan kelompok baru, penciptaan jaringan komunikasi baru, pembentukan koalisi baru antar kelompok dan sebagainya. *Potensi Redistribusi* sebagai dampak gerakan terhadap struktur peluang; seberapa jauh gerakan mampu menimbulkan keuntungan, hak

istimewa dan kepuasan bagi anggota, dan pengikut atau simpatisannya dan seberapa banyak yang didapat dari penentang atau musuh gerakan.

Atas dasar keterangan-keterangan yang dikemukakan di atas dengan menyadari keterbatasan keterbatasan kemungkinan penggunaan terhadap teori-teori tertentu di dalam subyek penelitian maka digunakan kedua bentuk teori yang disebutkan di atas sebagai peralatan dalam menggarap Gerakan Dakwah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia . Walaupun demikian perlu diberikan catatan bahwa di samping itu, juga digunakan teori- teori lain - sejauh dianggap relevan - di dalam menggarap masalah penelitian ini.

Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir dalam penelitian ini sedikitnya mempunyai dua persoalan yang menarik untuk dibahas:

1. Bagaimana gambaran umum Hizbut Tahrir Indonesia
2. Bagaimana strategi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia dan bagaimana relevansinya dengan sistem dakwah yang digerakkan oleh organisasi atau lembaga Islam lainnya.

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada, dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri negeri Islam. Sebagaimana ditegaskan Taqyuddin al-Nabhani bahwa perjuangan Hizbut Tahrir adalah menentang penjajahan segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari *hegemoni imperialis* dan kepemimpinan ideologi penjajah hingga ke akar-akarnya, baik aspek budaya, politik, militer, pendidikan, ekonomi dan segala aspek kehidupan umat, serta mengusir apapun bentuk penjajahan dari tanah air kaum muslimin (al-Nabhani,1993:72).

Tujuan gerakan Hizbut Tahrir sebagai gerakan dakwah politik dapat dilihat dalam tiga aspek:

Pertama, pada aspek doktrin Islam, Hizbut Tahrir ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam segala aspek kehidupan. Hizbut Tahrir berupaya untuk merekonstruksi dan mereorientasi umat Islam yang telah meninggalkan nilai-nilai filosofis al-Quran dalam hidupnya, untuk kembali menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dimana seluruh gerak dan langkahnya berada dalam aturan hukum dan undang-undang syar'i. Karena hanya dengan hukum syar'ilah umat Islam akan mampu meraih kembali kejayaan dan kemenangannya di dunia serta keselamatan di akhirat.

Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dalam segala dimensinya dengan berpedoman kepada al-Quran dan sunnah Nabi, bukan hanya dalam masalah-masalah ritual-simbolik keagamaan seperti shalat, puasa dan haji, tetapi juga meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan. Demi terealisasinya ajaran Islam di segala dimensi kehidupan umat manusia, Hizbut Tahrir memutlakkan adanya kekuasaan dan patron negara. Dan bagi Hizbut Tahrir satu-satunya sistem pemerintahan sebagai jalan tol menuju terlaksananya ajaran Islam kaffah adalah negara Islam dengan sistem Khilafah.

Tampaknya, Khilafah bagi Hizbut Tahrir merupakan agenda penting yang harus diwujudkan sebagai jaminan legitimasi kekuasaan dan patron tercapainya tujuan utama gerakan dan perjuangan Hizbut Tahrir, yaitu khilafah sebagai pemerintahan yang menjalankan wewenang kekuasaan dalam

mengatur kehidupan sebagai pemberi jaminan formal dan legal menuju teraplikasinya syari'at Islam.

Kedua, pada aspek sosial-politik, membebaskan umat Islam dari segala bentuk imperialisme, baik secara fisik dan materi maupun pemikiran dan doktrin. Hizbut Tahrir merupakan wadah perjuangan kolektif yang terorganisir melakukan perlawanan-perlawanan dengan mengungkap kebusukan imperialisme Barat dan imbas yang diakibatkan kepada kaum muslimin, Hizbut Tahrir melakukan aksi pemahaman dan penyadaran untuk kembali kepada Islam, sebagai ikatan ideologi untuk memperkuat barisan umat Islam melawan penjajahan.

Ketiga, pada aspek dakwah, menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia termasuk kepada non-Islam, karena Islam adalah agama langit yang rahmatan lil 'alamin diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia dari segala bentuk kerusakannya.

Gerakan dakwah Hizbut Tahrir dibangun di atas komitmen pembebasan umat melalui kegiatan dan aktivitas yang bersifat politik. Maksud kegiatan yang bersifat politik adalah urusan-urusan masyarakat harus diperhatikan sesuai dengan timbangan hukum-hukum dan pemecahan secara syar'i. Karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan umat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya berdasarkan nilai-nilai filosofis ajaran al-Quran dan sunnah nabi (Hizbut Tahrir,2003:5).

Operasionalisasi kegiatan ini tampak jelas dalam bentuk mendidik dan membina umat dengan tsaqafah (kebudayaan) islam, melebur umat dengan Islam, membebaskan umat dari aqidah yang rusak, pemikiran yang salah, persepsi yang keliru dan membebaskannya dari pengaruh ide-ide, pemikiran dan pandangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, dengan aktifitas ini diharapkan terjadi perubahan yang mencakup tiga hal: pertama, perubahan pola pikir dan ide-ide masyarakat (fikrah). Kedua, perubahan perasaan yang dimiliki anggota masyarakat. Ketiga, perubahan sistem (hubungan/interaksi) yang ada di dalam masyarakat (Zallum,tt: 24-25). Adanya perubahan pola pikir dan pemahaman inilah yang menentukan bentuk perasaan yang mendorongnya serta bentuk mekanisme tindakannya. Berdasarkan pemahaman dan perasaan tersebut, individu dan masyarakat akan merubah pola pandang mereka terhadap suatu kemaslahatan dan mengatur kemaslahatannya sehingga hubungannya dengan pihak lain dibentuk berdasarkan pemikiran, perasaan dan sistem yang diterapkan dan dimilikinya (Taquuddin al- Nabhani,2000:7).

Aktivitas politiknya juga meliputi perjuangan menentang imperialisme untuk membebaskan umat dari belenggu hegemoni dan cenkraman pengaruhnya. Serta kegiatan dan perjuangan politik dengan melancarkan kritikan, kontrol dan koreksi terhadap penguasa. Menentang para penguasa yang bersekongkol dengan Barat-imperialis dan mengungkapkan pengkhianatannya terhadap umat. Semuanya itu dilakukan secara damai tanpa cara-cara kekerasan (fisik/senjata) sesuai jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah (Hizbut Tahrir,2003:6-7).

Aktivitas yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa aktivitas Hizbut Tahrir merupakan aktivitas yang bersifat politik, bukan kegiatan yang bersifat sosial dan kerohanian. Aktivitas politik ini dilakukan sebagai pembebasan umat Islam dari lingkaran abu-abu. Hizbut Tahrir mendidik dan membina umat bukan dalam bentuk nasihat dan petunjuk-petunjuk, akan tetapi mendidik dengan pergolakan pemikiran. Masyarakat disadarkan dengan pergolakan pemikiran melalui penentangan terhadap ide-ide, aturan dan aqidah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis al-Quran dengan cara menjelaskan kerusakan yang dimilikinya dan dampak negatif yang ditimbulkan dan pemikiran westernis-sekularis yang telah mewabah di tengah masyarakat muslim.

Aktivitas yang sangat menitik beratkan pada pergolakan politik yang tidak memberikan perhatian utama pada akhlak, sebab akhlak dipandang sebagai bagian dari hukum syara' yang seharusnya setiap individu muslim menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dan menanggalkan akhlak yang tercela dari dalam dirinya sebagai konsekuensi dari peleburan diri mereka dengan Islam, dan bukan penyebab kebangkitan dan keruntuhan umat. Oleh karena itu Hizbut Tahrir berjuang membina dan mendidik umat dengan tsaqafah islamiyah dengan prioritas utamanya adalah pemikiran politik, karena bagi Hizbut Tahrir tidak ada wadah dan strategi perjuangan dalam Islam yang paling tepat kecuali pergolakan pemikiran politik dan organisasi politik.

Prioritas pada kerja kerja politik dan tidak mengutamakan aspek akhlak (bukan berarti mengabaikannya) memiliki korelasi kuat dengan tujuan Hizbut Tahrir sendiri yang ingin mendirikan negara Islam sebagai patron dalam mengatur semua tata laksana kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang sesungguhnya dengan syariat Islam. Yaitu masyarakat yang terbentuk dan terbina bukan karena akhlaknya, tetapi terdiri dari empat komponen yang paling mengikat, individu, pemikiran atau ide ide, perasaan dan peraturan berdasarkan syariat Islam, sebab itu politik sebagai jalannya.

Penjelasan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan politik Hizbut Tahrir meliputi; pertama mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam. Kedua, menggelindingkan pertarungan pemikiran. Ketiga, perlawanan menentang Barat-imperialistis. Keempat, mengontrol, mengkritik dan menentang penguasa yang mengkhianati amanat umat.

Mencermati apa yang telah dilakukan Hizbut Tahrir dalam proses pembentukan dan mengokohkan keberadaannya sebagai gerakan Islam Ideologis maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa Hizbut Tahrir merupakan suatu gerakan Islam yang lahir dari suatu fenomena yang memiliki kesinambungan dengan sejarah panjang umat Islam di satu pihak dan perubahan sosial yang dialaminya di pihak lain. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ernest Gellner. Hal ini dapat dijelaskan dari kondisi umat Islam pada saat kelahiran Hizbut Tahrir yaitu kondisi keterpurukan kaum muslimin akibat mereka meninggalkan ber hukum dengan hukum Islam dan mulai menerapkan hukum kufur.

Kondisi ini terjadi terutama setelah daulah khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh kaum kafir dengan bantuan Mustafa Kemal Attaturk yang dianggap dunia sebagai bapak pembaharuan Turki. Keruntuhan daulah khilafah ini kemudian disikapi oleh kaum muslimin dengan upaya yang tiada henti untuk mengembalikan daulah hanya saja upaya-upaya tersebut karena beberapa sebab tidak berhasil. Bercermin dan belajar dari upaya-upaya inilah kemudian Hizbut Tahrir lahir sebagai suatu partai ideologis Islami (al- Nabhani, 2000:10-25). Dari sini tepatlah penolakan yang disampaikan oleh Gellner terhadap pandangan yang menyatakan bahwa gerakan Islam hanya sebagai reaksi terhadap tantangan modernitas.

Dapat ditegaskan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir memiliki potensi besar untuk memberikan dampak gerakan terhadap masyarakat luas dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural dengan syarat setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir memahami betul apa yang harus mereka lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang digariskan oleh Hizbut Tahrir.

2. Strategi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia dan relevansinya dengan sistem dakwah yang digerakkan oleh organisasi atau lembaga Islam lainnya.

Islam yang dibawa rasulullah Muhammad saw merupakan agama dakwah, yakni agama yang membawa ajaran-ajaran untuk disampaikan kepada umat manusia. Konsekuensi logis dari keberadaan Islam sebagai agama dakwah maka Islam membutuhkan eksistensi dan peran dakwah. Dakwah merupakan sarana vital bagi proses perkembangan dan kemajuan Islam, baik pada masa sekarang maupun di masa akan datang. Bahkan al-Faruqi menyatakan bahwa Islam tidak bisa menolak dakwah jika Islam memiliki kekuatan intelektual. Menolak dakwah berarti menolak kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan orang lain terhadap apa yang diklaim sebagai kebenaran Islam. Tidak menuntut persetujuan orang lain atau berarti menyatakan klaim itu subyektif, partikularis atau relatif secara mutlak, karena itu tidak berlaku bagi orang lain selain pembuat klaim itu sendiri.

Oleh karena itu dakwah merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam. Apalagi setelah Rasulullah wafat, kewajiban dakwah menjadi sebuah keniscayaan menjadi doktrin ilahiah yang dinyatakan langsung di dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104. Bagi seorang muslim, dakwah merupakan keharusan untuk dilaksanakan. Secara historis, kehadiran dan peran dakwah senantiasa berinteraksi dengan dinamika atau perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan rasulullah Muhammad saw, betapa kehadiran dan peran dakwah memiliki arti yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya diperkenalkan dan diajarkan tentang bagaimana hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, dakwah yang dilakukan tidak terlepas dari konteks kehidupan bermasyarakat. Ajaran dakwah ini memberikan kerangka berfikir yang bersifat prinsipil dan metodologis dalam pengembangan masyarakat. Pembahasan tentang dakwah banyak memberikan bermacam-macam model dalam pengaplikasiannya.

Hizbut Tahrir dalam upaya menegakkan syari'at Islam melakukan strategi dengan tahapan yaitu Tahap Tatsqif (pembinaan dan pengkaderan), tahap Tafa'ul (berinteraksi) dengan umat dan tahap Istilamul Hukmi (pengambil alihan kekuasaan) (Afif, 2000:32).

Tahapan Pertama: Membentuk partai politik yang akan melakukan pembinaan atau pengkaderan (*Marhalah at-Tatsqif*). Partai politik yang dibentuk akan menyiapkan kader yang faham dengan Islam serta mau berjuang demi Islam, kader-kader ini dibentuk dengan pendidikan pengajian rutin mingguan dan bulanan, yang akan menyampaikan pemikiran dan metode dakwah Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Tujuan partai adalah melanjutkan kehidupan Islam, bukan untuk mengangkat menteri, anggota parlemen, apalagi mencari kesejahteraan moral atau tujuan spiritual. Kehidupan Islam akan berlangsung jika ada yang bertanggung jawab terhadap penerapan syari'at yaitu Khilafah. Perjuangan menuju Khilafah harus dilakukan secara berjamaah (berkelompok) (lihat QS. Ali Imran:104). Jadi bukan secara individual, sebab tidak mungkin individu-individu mampu memikul tugas amat berat tanpa bergerak bersama-sama dalam sebuah jamaah.

Secara politik, artinya perjuangan menuju Khilafah hendaknya menempuh jalur politik, bukan jalur lainnya (ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sebagainya), sebab permasalahan Khilafah adalah permasalahan politik. Karena, Khilafah adalah institusi politik. Dan kedua kata kunci ini, yaitu secara individual dan secara politik, akan dapat terwujud dalam sebuah partai politik. Partai politik inilah yang akan bergerak bersama umat dan di tengah umat untuk berjuang menuju tegaknya Khilafah.

Pembentukan marhalah tatsqif ini adalah tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang meyakini pemikiran dan metode partai politik guna membentuk

kerangka gerakan,” pada tahapan ini partai mulai membina orang-orang yang bersedia menjadi anggotanya dengan tsaqafahnya (al-Nabhani,2000:49).

Aktivitas hanya pada kegiatan pembinaan saja, yaitu penyampaian tsaqafah (materi) saja. Perhatian diutamakan untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota, membina meeka secara berkelompok dan intensif dalam halaqah-halaqah dengan tsaqafah (materi) yang telah ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu dengan Islam (menerima dan mengamalkan) ide-ide partai, serta berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan umat.

Tahapan kedua, adalah tahap berinteraksi dengan umat dan mendorongnya untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas dasar ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk berusaha mewujudkan dalam realita kehidupan. Bersama-sama Hizbut Tahrir, umat melakukan aktivitas untuk mendirikan *Daulah Khilafah*, mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (Afif,2000:35).

Pada tahap ini Hizbut Tahrir mulai beralih mengajak kepada masyarakat banyak dengan penyampaian yang bersifat kolektif. Pada saat ini Hizbut Tahrir melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini:

a. *Tatsqif Murakkazah* (pembinaan yang intensif).

Tatsqif Murakkazah merupakan amal politik untuk mencetak kader-kader politik. Secara sistematis dan berkelanjutan kader-kader ini dibina oleh partai politik sehingga mereka siap dan mampu mewujudkan cita-cita partai politik. Mereka tidak hanya mampu dari segi ide (fikrah), tetapi juga mampu untuk berkorban demi perjuangan partai. Hal ini merupakan aktivitas yang sangat penting dan mendasar dalam politik karena tanpa adanya kader tidak mungkin terjadi perubahan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu Hizbut Tahrir dalam aktivitas *tasqif murakkazah*, secara intensif melakukan proses kaderisasi dengan menanamkan aqidah Islam dan syariat Islam yang menyeluruh (komprehensif) sampai terbentuk syakhshiyah Islamiyah pada para kader tersebut, sehingga sebelum terjun ke masyarakat mereka sudah siap dengan solusi-solusi yang nyata untuk berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Secara praktis aktivitas ini dilakukan melalui halqah-halqah (kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang) dimana dalam halqah ini secara sistematis dan terarah dilakukan pengkajian terhadap ide-ide Islam dari kitab-kitab yang diadopsi oleh partai (Wadjdi,2005).

b. *Tatsqif Jama'iyah* (pembinaan kolektif/umum)

Tatsqif Jama'iyah dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan syariah Islam secara kaffah oleh Daulah Khilafah Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membina umat dengan tsaqafah Islam (pemikiran Islam), meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari aqidah rusak, pemikiran salah, serta pandangan-pandangan kufur. Aktivitas ini sangat penting karena tidak akan terjadi perubahan mendasar di tengah-tengah umat kalau tidak terjadi perubahan kesadaran masyarakat. Penegakan Daulah Khilafah haruslah dilakukan melalui umat dalam pengertian didukung oleh kesadaran umat, karena yang ingin dibangun adalah

pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran yang matang (*al hukmu 'ala al fikrah*) bukan semata-mata sikap emosional sesaat.

Oleh karena itu Hizbut Tahrir sebagai partai politik yang ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam naungan *Daulah Khilafah Islamiyah* harus terjun ke masyarakat menyampaikan Islam secara kaffah dan menyeluruh. Apabila di masa Rasulullah, bentuk kekufuran yang dilakukan masyarakat adalah menyembah berhala maka sekarang yang harus dijelaskan kepada masyarakat adalah bahaya ide-ide kufur seperti kapitalisme berikut ide-ide pokoknya (sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme dan lain lain. Dijelaskan pula kerusakan aturan-aturan kapitalisme dalam berbagai bidang yang menyengsarakan manusia. Cara praktis dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai uslub (teknis) dan wasail (sarana perantara) seperti pengajian umum, khutbah jum'at, seminar, diskusi publik, debat terbuka demikian pula bisa melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah dan lainnya. Diharapkan dari aktivitas ini akan muncul kesadaran umat untuk diatur hanya oleh syariat Islam. Kesadaran umat ini mendorong mereka untuk menuntut perubahan sistem negara yang telah menyimpang jauh dari Islam (Wadjdi,2005).

c. *Shira'ul Fikri* (pergolakan pemikiran)

Shira'ul Fikri sebagai suatu keniscayaan, perubahan masyarakat haruslah diawali dengan perubahan pemikiran di tengah-tengah masyarakat tersebut. Agar terjadi perubahan, masyarakat harus tahu bahwa pemikiran yang selama ini mereka anut dan percayai adalah keliru dan rusak bahkan membahayakan mereka. Oleh karena itu perlu dijelaskan dimana kerusakan ide tersebut dan bahayanya kepada masyarakat. Disinilah letak penting *shira'ul fikr* (pergolakan pemikiran) sebagai amal politik untuk merubah masyarakat. Pergolakan pemikiran ini dilakukan dengan cara menentang ide-ide yang salah, aqidah yang rusak atau pemahaman yang keliru di tengah masyarakat, dijelaskan kekeliruannya dan pertentangannya dengan Islam serta dijelaskan pula bagaimana ketentuan hukum Islam dalam perkara tersebut. Dalam konteks sekarang, yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam aktivitas ini adalah menjelaskan kekeliruan ide-ide kufur seperti sekularisme, nasionalisme, demokrasi, HAM dan lainnya. Dijelaskan pula bahayanya bagi umat dan pertentangannya dengan Islam dan bagaimana pandangan Islam dalam perkara tersebut. Secara praktis aktivitas ini bisa dilakukan melalui ceramah, khutbah jum'at, seminar, menerbitkan tulisan (buletin, koran, majalah) dan yang lainnya. Aktivitas *shira'ul fikri* ditujukan agar masyarakat memiliki kesadaran tentang kerusakan ide-ide kufur yang selama ini mereka anut, mencampakkan ide-ide tersebut dan menggantikannya dengan Islam (Wadjdi,2005).

d. *Kifahus Siyasi* (perjuangan politik)

Kifahus Siyasi diyakini bahwa sebuah sistem politik (negara atau masyarakat) akan berjalan selama rakyat masih percaya kepada penguasanya untuk mengatur kehidupan mereka. Untuk merubah sistem tersebut haruslah diputus kepercayaan rakyat terhadap penguasa yang ada, pengkhianatan mereka terhadap rakyat, ketidakbecusan mereka mengurus rakyat berikut persekongkolan mereka dengan negara-negara musuh imperialis yang melestarikan derita rakyat.

Oleh karena itu Hizbut Tahrir dalam aktivitas perjuangan politik ini menampakkan penentangannya terhadap negara-negara imperialis kafir dalam rangka membebaskan umat dari belenggu penjajahan mereka. Membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya baik berupa pemikiran, budaya, politik, ekonomi maupun militer dari seluruh negeri-

negeri Islam termasuk menentang penguasa, mengungkap pengkhianat mereka, melancarkan kritik (muhasabah), kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha mengganti mereka apabila mereka melanggar hak-hak umat. Perubahan masyarakat pada dasarnya sangat ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap penguasa mereka yang menerapkan berbagai kebijakan atas mereka dan sikap mereka terhadap partai politik yang menginginkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu dalam aktivitas ini, Hizbut Tahrir selalu mengawasi dan mengoreksi setiap kebijakan penguasa yang menyimpang. Menjelaskan bahayanya bagi umat dan bagaimana solusi Islam terhadap persoalan tersebut. Seperti mengkritik kebijakan kenaikan BBM, biaya pendidikan, transportasi, Undang-Undang Anti Terorisme dan lain lain. Sekaligus akan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap penguasa mereka yang memang tidak layak. Diharapkan hal ini kan memperkuat kesadaran masyarakat untuk mengganti sistem rusak yang ada di tengah-tengah mereka dengan sistem Islam. Secara praktis dilakukan melalui seminar, masiroh (unjuk rasa damai), pengiriman utusan, kepada penguasa atau parlemen, penyebaran buletin dan selebaran (*nasyroh*). Dari aktivitas ini masyarakat kan melihat bagaimana kepedulian dan kesiapan Hizbut Tahrir untuk memecahkan persoalan mereka (Wadjdi,2005).

e. *Tholabun Nushroh* (Meraih dukungan)

Tholabun Nushroh aktivitas ini dilakukan mengingat setiap sistem politik pastilah terdapat orang-orang yang kuat yang berpengaruh (ahlul quwwah), maka sikap orang-orang yang berpengaruh ini sangat menentukan keberhasilan perjuangan untuk menegakkan *Daulah Khilafah Islam*. Penerimaan mereka terhadap Islam yang disertai dengan kesadaran masyarakat akan mempercepat tegaknya sebuah sistem Islam demikian pula sebaliknya. Diharapkan dari aktivitas ini didapatkan dua hal yaitu perlindungan terhadap dakwah dan sampainya pada kekuasaan.

Dalam konteks saat ini, aktivitas tholabun nushroh dilakukan dengan mendakwahkan dan mencari dukungan dari kelompok-kelompok kuat dan strategis di tengah masyarakat. Saat ini rata-rata di dunia Islam yang menjadi kelompok kuat ini adalah pihak militer. Secara praktishal ini dapat dilakukan dengan mengkontak tokoh-tokoh penting militer dengan berbagai cara atau mengirim utusan kepada mereka, mengajak dialog agar mereka mendukung penuh tegaknya Daulah Khilafah Islam (Wadjdi, 2005).

Tahap ketiga: Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (*Marhalah Istilam Al-Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia.

Strategi dakwah yang dilakukan oleh setiap DPW dan DPD Hizbut Tahrir Indonesia di seluruh Indonesia mengadakan pembinaan intensif bagi anggota dengan sistem halqah-halqah dengan tujuan untuk membangun kerangka Hizbut Tahrir, memperbanyak pendukung dan melahirkan kepribadian Islam hingga mereka mampu mengemban dakwah dalam menghadapi pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Mereka dibekali materi sesuai dengan tingkatan dari halqah-halqah tersebut yang pada gilirannya mereka akan berinteraksi dengan masyarakat dan terdorong untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat dan mewujudkannya dalam realita kehidupan.

Hakikat dakwah Hizbut Tahrir adalah usaha untuk mendirikan negara Islam dan menjaga kesinambungannya. Negara Islam adalah negara yang terdiri atas agama Islam, negara yang melaksanakan syari'at Islam, yang bertugas menjaga tanah-tanah negara Islam, membela penduduk negara Islam, dan menyebarkan misi Islam di dunia. Sebetulnya tidak ada pertentangan sekitar

hakikat Negara Islam bahwa menciptakan sebuah negara atau kepemimpinan umum bagi agama Islam merupakan kewajiban bagi kaum muslimin atau merupakan rukun asasi agama Islam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam pada zaman sekarang sejak berakhirnya kekhalifahan di Turki termasuk lengah dan lalai dalam memenuhi kewajiban ini dan umat Islam bertanggung jawab sebagai konsekwensi dari sikap lalainya dihadapan Allah Swt. Itulah kewajiban umat Islam sekarang. Pengembangan sistem politik pada zaman modern merupakan hal yang mungkin bahkan wajib untuk dilaksanakan(Rais,2001:163).

Kewajiban-kewajiban yang bersifat fundamental adalah pertama, persatuan program operasional antara sesama kaum muslimin untuk bersatu. Kedua, kaum muslimin diharapkan agar mendirikan negara mereka berdasarkan sistem syura. Ketiga, kaum muslimin juga diharapkan agar menyelesaikan permasalahan mereka melalui permusyawaratan anatar mereka dalam segala hal. Keempat, kaum muslimin diharapkan agar sdelalu saling membantu dalam kebaktian dan ketaqwaan. Kelima, kaum msulimin diharapkan agar bangkit bersama-sama menuanaikan kewajiban jihad untuk menghalau musuh-musuh serta melindungi tanah-tanah dan negeri-negeri Islam. Keenam, kaum muslimin diharapkan berusaha memajukan rakyat kepada kebaikan, melarang kejelekan atau menghilangkan kemungkaran. Ketujuh, kaum muslimin diharapkan mampu mencurahkan seluruh tenaga untuk menyebarkan misi Islam di alam raya ini (Rais,2001:164).

Untuk mewujudkan seluruh kewajiban dan tujuan tersebut, wajib diadakan kepemimpinan umum kaum muslimin dalam bentuk musyawarah kolektif. Dengan kepemimpinan ini, umat Islam telah melaksanakan kewajibannya yang telah diperintahkan oleh agama. Disini ada pertalian kembali antara Islam dan sejarahnya, Islam akan selalu tetap utuh sebagai kekuatan operasional yang melindungi kekuatan spiritual masyarakat Islam. Islam memiliki orientasi untuk mendorong dunia pada kemajuan manusia atau kemajuan etika, mendorong dunia pada terbitnya era baru persaudaraan, persatuan dan perdamaian.

Keharusan kerja sama dalam menmyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang berkatan dengan pola hubungan antar individu dan masyarakat diperlukan kesadaran dan kerja sama yang manifestasinya dituangkan dalam suatu institusi dan lembaga. Keharusan tersebut kemudian melahirkan teori tentang negara yang dapat menata masyarakat secara lebih formal dan bersifat kolektif (Hatamar,2000:52).

Dalam konteks perumusan teori tentang proses pembentukan negara dan pemerintahan tidak banyak yang berbeda di antara para pemikir politik Islam, bahwa keterbatasan manusilah yang menjadikan keniscayaan untuk saling bekerja sama (koperasi sosial) untuk dapat memnuhi keanekaragaman kebutuhan mereka, yang tidak mungkin dipenuhi oleh individu-individu manusia tanpa kerja sama. Beberapa konsep dan teori tentang kerja sama sosial (bahwa manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk personal) yang dikemukakan oleh al-Farabi, Ibn Rabi', al-Ghazali, al-Mawardi dan Ibn Timiyah sesungguhnya merupakan kerangka dasar bagi teori *as'abiyah-nya* Ibn Khaldun. Dalam pandangan sosiologi bahwa manusia adalah makhluk sosial merupakan teori dasar yang kemudian dikembangkan di Barat. Adanya persamaan konsep dasar antara Islam dan Barat yaitu adanya kebutuhan logis dan rasional manusia. Perbedaan dasarnya adalah kalau dalam konsep Islam selain merupakan kebutuhan alamiah, secara doktrinal memang fithrah yang diciptakan Allah bagi manusia, sedangkan dalam pandangan Barat kerja sama sosial itu dilakukan atas pertimbangan rasional dan *natur* (watak dasar) manusia (Hatamar,2000:53).

Urgensi atau hajat terhadap pembentukan institusi negara ini melahirkan ijtihad bahwa hajat itu bersifat wajib atas dasar syari'at (wajib syar'iy) berdasarkan konsensus (ijma') umat Islam. Hal

ini adalah bukti sejarah dalam politik Islam, sebab pengangkatan Khalifah awal dalam Islam merupakan hajat yang mendesak pada waktu itu, sebagai upaya umat Islam untuk menggantikan tugas-tugas kenabian guna mengatur dan menata kehidupan masyarakat muslim.

Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah Saw hingga al-Khulafa al-Rasyidun jelas bahwa Islam mempraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur, panglima-panglima diangkat dan diberhentikan oleh Khalifah. Hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Umawiyah di Damaskus. Kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lainnya yaitu Daulah Abbasyiyah di Bagdad, Daulah Uluwiyah di Mesir dan Daulah Umawiyah di Andalusia. Oleh karena itu walaupun dunia Islam itu terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada di dalam wilayah darul Islam (Syarif,2008:200).

Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk republik telah dipraktikkan Republik Iran yang beraliran Syi'ah dan Republik Islam Fakistan, Republik Irak dan Republik Afghanistan yang beraliran Sunni. Beberapa negara ini telah menjadi contoh dari negara kesatuan Islam yang berbentuk republik. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, dimana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan oleh keturunan penguasa (Syarif,2008:201). Jadi pada masa sekarang, umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*) sebagai respons terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.

Hal ini tentunya ada perbedaan bentuk negara yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir bahwa sistem negara adalah sistem Khilafah yang wilayahnya berskala internasional, seperti pada masa Dinasti-dinasti Islam masa lalu.

C. Penutup

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam yang independen. Organisasinya memiliki kekhasan seperti; berasaskan syari'at Islam, ide dan aksi politiknya bukan politik praktis tetapi politik-ideologis, konseptual, rasionalis dan non-kekerasan. Hizbut Tahrir mengkonsepsikan politik sebagai *al-ri'ayah al-syuuni al-ummah*; tanggung jawab untuk menguasai kepentingan dan kemaslahatan umat. Sebab itu, pemikiran dan aktivitasnya dimantapkan dapa tataran politik sebagai wujud pelaksanaan urusan umat.

Gerakan dakwah menurut Hizbut Tahrir Indonesia ada dua; pertama, sistem dakwah yang dibangun membentuk tegaknya syari'at Islam dengan berdirinya Khilafah artinya bukan berbentuk republik, diktator, kekaisaran, monarkhi, federal atau sistem demokrasi. Kedua, strategi dakwah Hizbut Tahrir dalam upaya penegakan syari'at Islam berupa pembinaan intensif melalui halqah-halqah; pembinaan umum melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, melalui media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran dan penerbitan majalah bulanan dan bulletin mingguan; pergolakan pemikiran untuk menentang kepercayaan, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur; perjuangan politik berbentuk berjuang menghadapi negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Dakwah yang digerakkan oleh Hizbut Tahrir tetap relevan dengan dakwah yang digerakkan oleh organisasi Islam lainnya sehingga sangat rasional untuk diperjuangkan dan

didukung oleh seluruh umat Islam. Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir hanya membatasi aktivitasnya dalam dua aspek yaitu dakwah intelektual (*fikriyah*) dan dakwah politis (*siyasiyah*) serta tidak menggunakan kekuatan fisik (*laa madiyah*). Semua pemikiran dan aktivitasnya senantiasa muncul dan berlandaskan pada aqidah Islamiyah.

Daftar Pustaka

- Abu Muslim, Imam bin Hajaj Husen, 1993, *Terjemah Shaheh Muslim*, CV. Asyifa', Semarang.
- Al-Anshari, Jalal, 2004, *Mengenal Sistem Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Al-Banna, Hasan, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (terj)*, Solo: Intermedia.
- Al-Maududi, Abul A'la, 1994, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, tt, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nabhani, Taqyuddin, 1989, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taqyir*, tp:tk.
- , 1993, *Peraturan hidup Dalam Islam (Terj)*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 1993, *Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir (Diterjemahkan oleh Abu Afif dari Mafaham Hizbut al-Tahrir)*, Indonesia: Thariqul Izzah.
- , 1994, *al-Daulah al-Islamiyah*, Dar al-Ummah, Bairut.
- , 1994, *al-Syahsiah al-Islamiah I*, Libnan: Dar al-Ummah.
- , 1996, *Nizham al-hukmi fi al-Islam*, Darul Ummah, Beirut.
- , 2000, *Negara Islam*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 2000, *Pembentukan Partai Politik Islam (terj)*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 2001, *Nizham al-Islam*, Min mansyurat Hizbut al-Tahrir.
- , 2003, *Piagam Umat Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- , 2006, *Mafahim Hizb At Tahrir*, Cetakan 2
- al-Syawi, 1997, *Syuro Bukan Demokrasi*, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 2004, *Hizbut Tahrir, Khilafah dan Syariah*, HTI, Jakarta.
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, 1986, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra, Semarang. 1986.
- Anwar, Romli, 2004, *Kajian PAT Perspektif Kelompok Keagamaan, Studi Kasus Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir*, Skripsi, Palembang.
- Apter, David E, 1998, *Pengantar Analisa Politik (Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama)*, Yogyakarta: Rajawali Press
- Arjomand. 1991. "Unity And Diversity In Islamic Fundamentalism". Dalam Martin E. Marty & R. Scoot Appleby (eds), *Fundamentalism Comperhended*, London
- Ashar Anshori, 2007, *Fiqh Dakwah*, 'Izzan Pustaka, Yogyakarta.
- Basyar, Syaripudin, 2001, *Pergolakan Politik Islam di Tengah Modernisme (Kajian atas Gagasan Politik Al-Kawakibi)*, Disertasi, PPS IAIN Sunan Kali Jaga, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burns, P., The Post Trials: *Religious Principles And Legal Issues: Indonesia, 1998*, dalam Tolkhah, Imam., *Democracy In Indonesia's*. New Order (Sub Thesis 1992)
- Cahyadi Takariawan, 2005, *Prinsip-Prinsip Dakwah*, 'Izzan Pustaka, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surya Cipta Aksara, Jakarta.
- Esposito, John L. 1988. *Islam: The Straight Path* (Diterjemahkan oleh arif Maftuhin). Paramadina, Jakarta.

- , 2004, *Islam dan Kekuasaan Pemerintahan Dokterin Iman dan Realitas Sosial*, Inisisasi Press, Jakarta.
- Hamka, 1984, *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam*, Pustaka Panjimas. Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddieqy TM, 1977, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hizbut Tahrir Indonesia, 1998, *Bagaimana Menjadi Bagian Integral Hizbut Tahrir*
- , 2002, *Menegakkan Syariat Islam*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 2003, *Mengenal Hizb At Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, www.al-islam.or.id
- , 2005, *Seruan Hizbut Tahrir Kepada Umat Islam, Khususnya kalangan militer*, Tim Hizbut Tahrir Indonesia, tk.
- Hasan, Hasan Ibrahim, 1979, *Tarikh al- Islam al-Siyasah wa al-Din wa al- Tsaqafah al- Ijtima' al-Qahiraah*, Maktabah al- Nahdlah al- Islamiyah.
- , 1089, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Diterjemahkan oleh Djahdan Humam dari Islamic Hiostory and Cultur From 632 1968), Yogyakarta.
- Hasyim, Syafiq. 2002. *Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna*. Afkar, No.13, 5-18
- Hawwa, Zaid,tt, *Al- Islam, Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*, Ishlahiy Press, Jakarta.
- Heijer, Johannes Den dan Syamsul Anwar, 1993, *Islam, Negara dan Hukum*, Inis, Jakarta.
- Hilal, Syamsul, 2002, *Gerakan Dakwah Formal di Indonesia*, Pustaka Tarbiuna, Jakarta.
- Huwaidy, Fahmi, 1993, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani (Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar dari al- Islam wa al- Demokratiyah)*, Mizan, Jakarta.
- <http://kangsumar.blog.com/2012/02/08/dakwah-dalam-perspektif-al-quran>.
- Imarah, Muhammad, 1993, *al-Islam wa al-Siyasah, al-Radd 'ala al-Syubhat al- 'Almaniyyin*, Dar al-Tauza' wa al-Nasyr al-Islamiyah, Kairo.
- Jabir, Hussain bin Muhammad bin Ali, 2001, *Menuju Jama'atul Muslimin (Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari al-Thariq Ila Jama'ah al-Muslimin)*, Robbani Press, Jakarta.
- Jamhari, Jajang Jahroni, 2004, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (edisi pertama). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jari, David dan Julia Jary, 1991, *The Harpercolling Dictionary of Sociology*, Harper Peremial, United States.
- Kartodirdjo, sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografy*. Indonesia: Satu Alternatif. Gramedia, Jakarta
- Kasdi, Abdurrahman. 2002. *Fundamentalisme Islam Timur Tengah*. Afkar, No.13, 19-33
- M.Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Al-Mishbah Jilid.2*, Lentera Hati, Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Islam*. Paramadina, Jakarta
- Majid, Nurcholis. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta
- Moleong, Lexy, J, 2000, *Motodologi Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Mujiburrahman. 2002. *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*. Afkar, No.13, 74-93
- Nasution, Harun, 1975, *Pembaharuan Dalam Islam*, Sejarah pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Jakarta.
- Noer Deliar, 1979, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, P3ES, Jakarta
- Nur Khalis, Abu Afif dkk, 2002, *Mengenal Hizbut Tahrir*, Tariqul Izzah, Depok.

- Pulungan, J, Suyuthi, 1999, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1993, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Disertasi, Jakarta.
- Qordhawi, Yusuf, 2001, *Gerakan Pengamalan Islam secara Kaffah*, Penebar salam, Jakarta.
- Rahman, Fazlur, 1985, *Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual (Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dari Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition)*, Pustaka, Bandung.
- , 1994, *Islam (Diterjemahkan oleh Ahsin Muhmad dari Islam)*, Pustaka, Bandung
- Rahman, Fazlur, 1979. *Islam And Modernity, An Intellectual Transformation*. Bibliotheca Islamica, Minnespolis
- Raji, Abdullah M. Sufyan, 2006, *Mengenal Aliran-aliran dalam Islam dan ciri-ciri ajarannya*, Pustaka al- Riyadl, Jakarta.
- Sabine, G.B. 1977, *Teori-teori Politik (I): Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Diterjemahkan oleh Soewarno Hadiatmodjo)*, Bina Cipta, Jakarta.
- Salim, Abdul Muin, 1994, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Samarah, Ihsan, 1991, *Mafhun al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al- Islami al- Ma'ashir*, Libnan: Dar al-Nahdah al-Islamiyah
- , 2003, *Syaikh Taqiyuddin al-nabhani, Menoropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, Al-Azhar Press, Bogor.
- Syarif, Ibnu Mular & Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah*, Erlangga, Jakarta.
- Sztompka, Piotr, 1993. *The Sociology of Social Change* (diterjemahkan oleh Alimandan) Prenada Media, Jakarta
- Tahrir, Hizbut, 2000, *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*, Pustaka Tariqul Izzah, Depok
- Tholkhah, Imam, Choirul Fuad. 2002. *Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi*. Badan LITBANG Agama dan Diklat Keagamaan, DEPAG RI, Jakarta.
- Tholkhah, Imam, 2002. *Krisis Sosial dan Kebangkitan Gerakan Radikalisme Keagamaan Era Reformasi di Indonesia*. *Dialog*, No. 54 th XXV,13-28
- Wamy, 1995, *Gerakan Keagamaan dan Pembeneran: Akar Ideologis dan Penyebarannya* (Diterjemah oleh A. Najiullah dari al-Mansu'ah al-Man yassarah fi al- Adyan wa al- Mazahib al- Ma'ashirah), Al- Islahy Press, Jakarta.
- Zallum, Abdul Qadim, 1990, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah.
- ,tt, *Sistem Pemerintahan Islam*, Al Azhar Press, Jakarta.
- , 2007, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.